

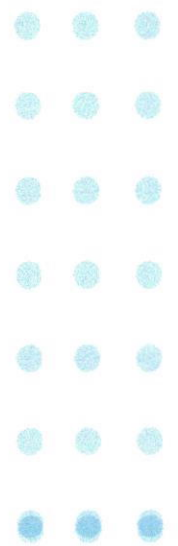


**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**



**2023**

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**







## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.3 ISU STRATEGIS .....	4
1.4 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	10
2.1 RENCANA STRATEGIS .....	10
2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	11
2.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN TANTANGAN DAN PELUANG DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB .....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	21
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	29
3.4 PRESTASI ATAU PENGHARGAAN .....	38
BAB IV PENUTUP .....	41



## Kata Pengantar

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja 2023.

Laporan LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2023 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktifitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis



**H. HAMBALI, S.Pd.I**

Pembina TK.I

NIP. 19670305 198811 1 001





## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah melakukan upaya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan amanat yang diberikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang- kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LAKIP disamping merupakan alat akuntabilitas, sekaligus juga sebagai sarana yang strategis untuk evaluasi organisasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi kedepan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memberikan layanan prima kepada masyarakat.

Tahun 2023 merupakan tahun kelima berdirinya organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis, yang sebelumnya bergabung dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. Langkah pada tahun pertama ini disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021- 2026 dan RENSTRA 2021-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator- indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;





dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksana evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

> 100%	:	Tercapai Melebihi Target (TMT)
= 100%	:	Tercapai Sesuai Target (TST)
< 100%	:	Tidak Tercapai (TT)

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk dari target 1,64% dapat terealisasi sebesar 1,59%. Indikator menurunnya angka kelahiran total (TFR) dari target 2,12% terealisasi sebesar 2,62 %, belum dapat dicapai sesuai target karena masih terealisasinya capaian target kesertaan ber KB. Upaya peningkatan kesertaan ber KB secara terus menerus telah dilakukan melalui peningkatan pelayanan, penyampaian informasi/ advokasi dan KIE kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis,





khususnya pada saat dilaksanakan kegiatan penancangan moment-moment kegiatan KKBPK/BANGGA KENCANA di Kabupaten Bengkalis.

Indikator meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /MCPR) realisasi sebesar 63,45% dengan target sebesar 47,52%. Dan indikator persentaseKebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) dari target 19,81 dapat terelisasi sebesar 16,09%, Faktor keberhasilannya adalah peningkatan pemahaman masyarakat khususnya wanita usia subur (WUS 15-49) tentang pentingnya mengikuti program KB dengan merencanakan kelahiran, Kerjasama antar stakeholder bidang KKBPK yang solid dan dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang tergabung di dalam Fapsedu terjalin dengan baik sehingga di dalam pelaksanaan pemberian advokasi dan KIE kepada masyarakat dapat tercipta dan berjalan sesuai dengan harapan.

Indikator Jumlah kelompok BKB,BKR,BKL dan UPPKS tercapai target, dimana target tahun 2023 sebesar 55 dan realisasinya sebesar 99 kelompok, dan indikator persentase kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) yang aktif pada tahun 2023 dengan target 55% (99 kelompok) terealisasi sebesar 180% (99 kelompok).

Indikator jumlah kelompok generasi berencana (PIK-R) tahun 2023 dengan target sebanyak 40 Kelompok tercapai sebanyak 82 kelompok, sedangkan Persentase PIK-R aktif di tahun 2023 dengan target sebesar 65 % terealisasi sebesar 100%, capaian yang cukup.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah dan juga pembantuan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah



perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku unsur pembantu pimpinan dalam hal ini Bupati, dituntut selalu melakukan peningkatan kinerja.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk itu perlu dipahami dan diimplementasikan azas-azas umum penyelenggaraan negara, yang meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian

indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan sesuai dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis periode tahun 2021-2026.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis 2022 dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang pertanggungjawaban capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, keterbukaan informasi, proporsionalitas dan profesionalitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Memacu stakeholder untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dapat berperan menciptakan pemerintahan yang berazaskan kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif.



3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari Masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

### **1.3. ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisa lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (Lima) tahun. Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan pada perumusan isu-isu strategis. Dilakukan dengan menganalisa berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau. diatas serta permasalahan Rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan Visi, Misi Kepala Daerah terpilih serta kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Berikut ini adalah isu-isu strategis yang menjadi tujuan serta sasaran Dians Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis:

- a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas
- b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
- c. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi
- d. Menata dan memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di desa/kelurahan

## **1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

### **1.4.1 Tugas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok sebagai berikut: “Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”.

### **1.4.2 Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut:

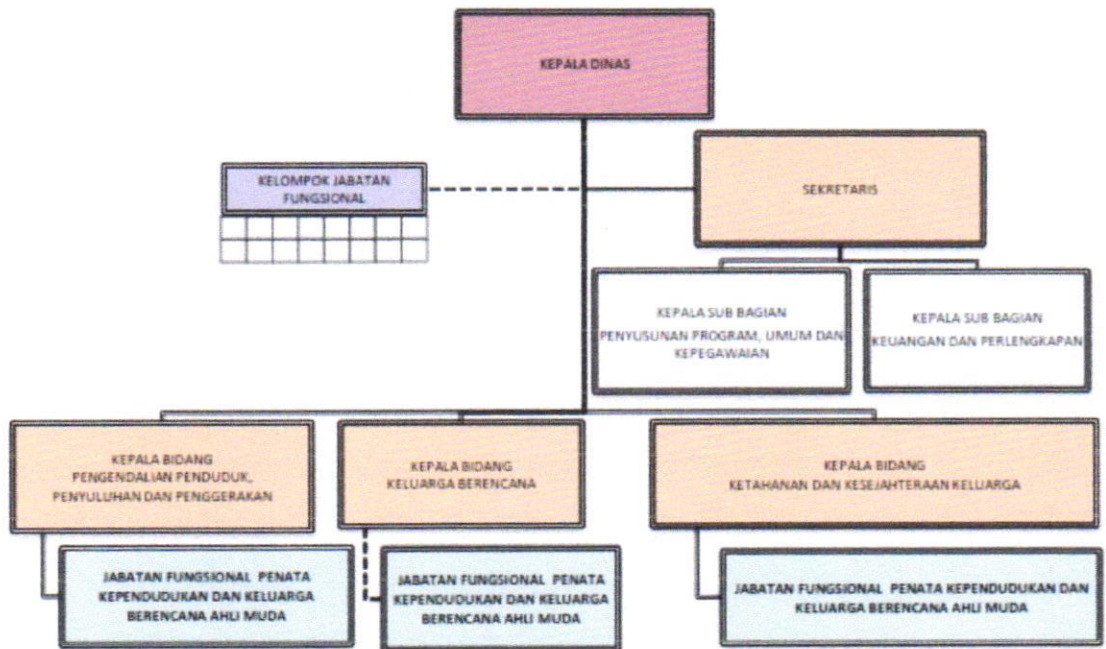
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 2.1.1 Struktur Organisasi DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS

LAMPIRAN : PERBUP KABUPATEN BENGKALIS  
Nomor : 106 Tahun 2021  
Tanggal : 30 Desember 2021





## Berencana

### 1.5.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, guna menjalankan roda organisasi dalam menjalankan fungsi pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki sumber daya manusia berjumlah 38 orang PNS dengan rincian jumlah PNS menurut jabatan, golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

#### Jumlah Pejabat Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Berdasarkan Eselon

No	Jenis Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II a	1	-	1
2	Eselon III a		1	1
3	Eselon III b	1	2	3
4	Eselon IV a	1	1	2
5	Jabatan Fungsional	1	4	5
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>

Jumlah PNS perempuan mendominasi berdasarkan jenis jabatan dengan jumlah perempuan ada 8 orang dan laki-laki 4 orang. Dari total pegawai negeri sipil 38 orang dan PNS perempuan ada 18 orang dan PNS laki-laki juga 20 orang. Selengkapnya disajikan pada Tabel dibawah ini.



**Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Berdasarkan Pangkat**

No	Jenis Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV c		-	
2	IV b	2	1	3
3	IV a	2		2
4	III d	2	4	6
5	III c	-	5	5
6	III b	3	8	11
7	III a	5	3	8
8	II d	5	-	5
9	II c	-	-	-
10	II b	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>

**Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S 2	5	2	7
2	S 1	6	13	19
3	D 3	-	2	2
4	SLTA	9	3	12
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>



Jumlah PNS sebagian besar lulusan S1 sejumlah 19 orang, berpendidikan D3. 2 Orang, SLTA 12 orang dan S2 7 orang, dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan hal ini merupakan potensi bagi organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya di Kabupaten Bengkalis. Namun dari jumlah PNS tersebut belum memadai karena belum diberdayakan semuanya, selain motivasi dari PNS biasa – biasa saja yang membuat sumber daya ini sebagian besar masih berupa potensi saja, dan belum efektif karena mereka belum menggunakan perannya secara optimal dalam melaksanakan tugas.





## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

#### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan merujuk pada pasal 6 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 272 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dinamakan sebagai Rencana Strategis (Renstra) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Pada pasal 272 ayat (2) Undang-Undang 23 tahun 2014 disebutkan bahwa “Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah”.



Ditingkat nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) 2005-2025 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2019 – 2024 dengan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015, saat ini Kabupaten Bengkalis telah memiliki RPJMD periode tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah daerah. Sesuai dengan peraturan perundangan, RPJMD Kabupaten Bengkalis memuat visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bengkalis 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Riau serta RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan rencana pembangunan berskala Kabupaten yang juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan wahana untuk menyatukan pandangan seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun.

Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis, Renstra selanjutnya dioperasionalkan melalui konsolidasi Perangkat Daerah, disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Renstra ini disusun melalui proses analisa potensi, permasalahan serta memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, dan mengkaji isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra BKKBN 2019-2024 dan BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 menjadi sumber acuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah.





## 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok sebagai berikut: “Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya





### **2.3. Identifikasi Permasalahan Tantangan dan Peluang Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**


Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun mendatang mengemukakan berbagai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang di butuhkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis:

#### **A. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:**

1. Menurunkan angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang selalu meningkat tiap tahun;
2. Menurunkan angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun.
3. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR).
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).
5. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun).
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS 15-49 tahun.
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat terutama di pedesaan terkait program KKBPK/Bangga Kencana (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga);

#### **B. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Adanya komitmen Pemerintah pusat untuk menyusun kebijakan tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- 
2. Komitmen pemerintah pusat di dalam penyediaan dana alokasi khusus (DAK) Bidang Kesehatan subbidang Keluarga Berencana. Sehingga sangat membantu Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan peran Bangga Kencana di daerah dengan bantuan DAK untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasana KB.
  3. Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis di buktikan dengan adanya program-program khusus untuk meningkatkan Profram bangga Kencana di Kabupaten Bengkalis melalui RPJMD 2021-2026.
  4. Adanya jaringan kerja dalam pelaksanaan dinas dari Tingkat Kabupaten sampai Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, RT untuk peningkatan dan menyukseskan program Bangga Kencana.
  5. Tingginya partisipasi dari faskes-faskes yang ada di Kabupaten Bengkalis.
  6. Kebiasaan /adat untuk tidak menikah di usia muda bagi anak perempuan khususnya di pedesaan.
  7. Kesadaran dari pemuka masyarakat dan tokoh agama pentingnya program Bangga Kencana di Kabupaten Bengkalis.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran Strategis sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)



Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :

**Rencana Strategis Tahun 2021- 2026**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yang Mengacu**  
**Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Meningkatnya pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1. Persentase angka laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,66	1,65	1,64	1,63	1,62	1,61	1,61
		Menurunya angka kelahiran total (TFR)	2,23	2,22	2,12	2,10	2,08	2,01	2,01
2.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB	1.Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /MCPR)	47,01	47,10	47,52	48,10	48,86	49,00	49,00
		2 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmed Ned)	20,01	19,97	19,81	16,65	19,02	18,62	18,62
		3. Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA yang aktif	45	50	55	60	65	65	65
		4. Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA yang aktif	55	60	65	70	75	75	75
3.	Meningkatnya peran aktif kelompok Generasi Berencana	1. Jumlah Kelompo PIK-R Aktif	30	35	40	45	50	50	50
		2. Persentase	55%	60%	65%	70%	75%	75%	75%



		Kelompo PIK-R Aktif							
4	Meningkatnya Kualitas Capaian kinerja	1. Predikat Akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	100	100	100	100	100	100	100
5.	Meningkatnya dukungan manajemen dalam administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (umum dan kepegawaian)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai yang Memiliki Kompetensi Sesuai Fungsinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam menjalankan kegiatan pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Bengkalis memiliki target- target yang telah ditetapkan melalui RENSTRA OPD yang mengacu pada RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan pelaksanaan kegiatan dengan rincian target capaian antara kepala daerah dengan kepala dinas, kepala dinas dengan kepala bidang serta kepala bidang dengan kepala subbagian atau kepala seksi.

Tujuan dari perjanjian kinerja diharapkan dalam melaksanakan kegiatan dapat diukur tingkat keberhasilannya dan pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap keberhasilan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pada akhirnya diharapkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tadi berhasilguna.

Berikut disampaikan Perjanjian Kerja Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

### Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1.Persentase angka laju Pertumbuhan Penduduk	1,64%
	2.Persentase angka kelhairan Total (TFR)	2,12%
Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB	1.Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /MCPR)	47,52%
	2.persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmed Ned)	19,81%
	3.Jumlah Kelompok (BKB, BKR, BKL dan UPPKA) yang aktif	55
	4.Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) yang aktif	55%
Meningkatnya peran aktif kelompok Generasi Berencana	1. Jumlah PIK-R aktif	40
	2. Persentase PIK-R aktif	65%
Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja	1.Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB
	2.Persentase Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Keuangan	100

Pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis melaksanakan 4 sasaran dengan 10 indikator. Hal ini dapat di lihat pada tabel perjanjian kinerja di atas. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 bertujuan untuk mencapai sasaran dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.





### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.






Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksana evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

- > 100% : Tercapai Melebihi Target (TMT)
- = 100% : Tercapai Sesuai Target (TST)
- < 100% : Tidak Tercapai (TT)

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja utama. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja OPD Tahun 2023.

**Tabel**

**Pengukuran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1.	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1. Persentase angka laju pertumbuhan penduduk	1,64%	1,59%	103,14%
		2. Persentase angka kelahiran total Fertility Rate (TFR)	2,12%	2,62%	80,92%
2.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB	1. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /MCPR)	47,52%	63,45%	133,52%
		2. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	19,81%	16,09%	123,12%
		3. Jumlah kelompok (BKB, BKR, BKL dan UPPKA) yang aktif	50	99	180
		4. Persentase kelompok (BKB, BKR, BKL dan UPPKA) yang aktif	55%	99%	180%
3.	Meningkatnya kelompok Generasi Berencana	1. Jumlah Kelompok PIK-R aktif	40	82	205%
		2. Persentase Kelompok PIK-R aktif	65%	100%	153,85%





4.	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	1. Predikat akuntabilitas kinerja	BB	-	-
		2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	100	-	-

### **B. Analisis Kinerja**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 10 (Sepuluh) indikator tersebut telah tercapai namun masia ada bebebrapa indikator belum maksimal yang telah ditetapkan.

**SASARAN 1: MENINGKATNYA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN  
PENDUDUK**

**1. Indikator kinerja Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk**

NO.	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %	KET
1.	Persentase angka laju pertumbuhan penduduk (LPP)	103,7%	1,64%	1,59%	103,14%	
	Rata rata Capaian				103,14%	

Indikator Jumlah Persentase angka laju pertumbuhan penduduk dari target 1,64 dapat terealisasi sebesar 1,59, hal ini dapat dicapai karena berhasilnya menyampaikan informasi/ advokasi dan KIE kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis, khususnya pada saat dilaksanakan kegiatan pencaangan moment- moment kegiatan KKBPK di Kabupaten Bengkalis.

Faktor – faktor yang yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Teknis kerja sama antara Dinas dengan OPD terkait
2. Adanya KIE kepada Masyarakat
3. Kualitas Sumber daya Manusia dalam pembinaan dan Penyuluhan Program.

Permasalahan / Hambatan :

1. Belum Maksimalnya Pembinaan dan Penyuluhan
2. Kurang nya KIE
3. Rendahnya kualitas Sumber daya Manusia
4. Terbatasnya Petugan Penyuluh Keluarga Berencana di lapangan

Solusi/ Strategis Pemecahan Masalah :

1. Merencanakan, Penganggaran dan melaksanakan Program Kegiatan
2. Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program melalui kegiatan peningkatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
3. Mengoptimalkan Petugas Penyuluh KB ditingkat lini lapangan

## 2. Indikator kinerja Persentase angka kelahiran total Fertility Rate(TFR)

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %	KET
1..	Persentase angka kelahiran total Fertility Rate (TFR)	94,59%	2,12%	2,62%	80,92%	
	Rata rata Capaian				80,92%	

Indikator Persentase angka kelahiran total Fertility rate (TFR) dapat tercapai dengan realisasi sebesar 2,62% dengan target sebesar 2,12%. Target belum tercapai semaksimal mungkin untuk itu perlu peningkatan kesadaran kesertaan ber KB dan PUS melalui pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan KB, serta meningkatkan kerja sama yang lebih intensif bersama mitra terkait. Hal ini terutama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khusus wanita usia subur (WUS 15-49 tahun) tentang pentingnya mengikuti program KB.

Mitra strategis program Bangga Kencana antara TNI, TP PKK, IBI dan dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang tergabung di dalam Fapsedu, khususnya dalam pemberian advokasi dan KIE kepada masyarakat.

Faktor – faktor yang yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Teknis kerja sama antara Dinas dengan OPD terkait (TNI, TP PKK, IBI serta Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat.
2. Adanya KIE kepada Masyarakat
3. Kualitas Sumber daya Manusia dalam pembinaan dan Penyuluhan Program.

Permasalahan / Hambatan :

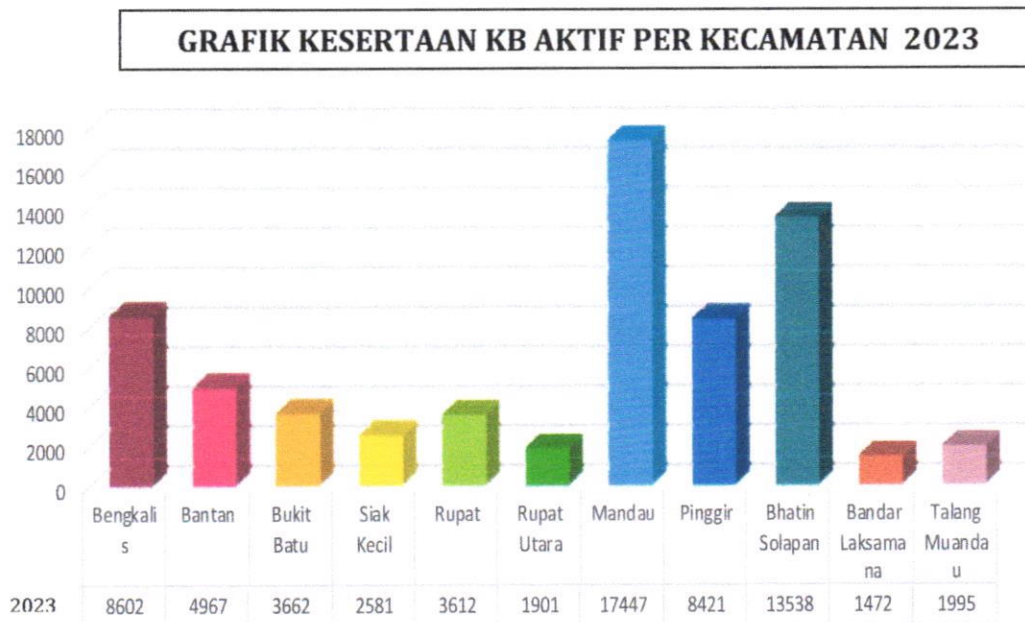
1. Belum Maksimalnya Pemberian Advokasi dan KIE Kepada masyarakat
2. Rendahnya kualitas Sumber daya Manusia
3. Kurangnya dukunga Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana



Solusi/ Strategis Pemecahan Masalah :

1. Merencanakan, Menganggakan dan melaksanakan Program Kegiatan
2. Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program melalui kegiatan peningkatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
3. Perlu peningkatan kesadaran kesertaan ber KB dan PUS melalui pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan KB, serta meningkatkan kerja sama yang lebih intensif bersama mitra terkait.

**SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM MENGIKUTI PROGRAM KB**



**1. Indikator Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern  
Contraceptive Prevalence Rate /MCFR)**

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %	KET
1.	persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraeptive Prevalece rate /MCFR)	106,68%	47,52%	63,45%	133,52%	
	Capaian rata Rata				133,52%	

Indikator persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /MCFR) sudah tercapai lebih baik , yakni target tahun 2023 sebesar 47,52% sedangkan realisasinya sebesar 63,45%. Namun demikian indikator persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalece Rate /MCFR) telah tercapai 100%

Faktor – faktor yang yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Teknis kerja sama antara Dinas dengan OPD terkait (TNI, TP PKK, IBI serta Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat.
2. Adanya KIE kepada Masyarakat baik ditingkat RT sampai ketinggian Desa
3. Kualitas Sumber daya Manusia dalam pembinaan dan Penyuluhan Program sangat Baik

Permasalahan / Hambatan :

1. Belum Maksimalnya Pemberian Advokasi dan KIE Kepada masyarakat tentang program KB
2. Rendahnya kualitas Sumber daya Manusia dilini lapangan
3. Kurangnya dukunga Masyarakat dalam mengikuti Program Keluarga Berencana

Solusi/ Strategis Pemecahan Masalah :

1. Merencanakan, Menganggakan dan melaksanakan Program Kegiatan dimaksud.



2. Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program melalui kegiatan Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraeptive Prevalece rate /MCFR)
3. Perlu peningkatan kesadaran kesertaan ber KB dan PUS melalui pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan KB, serta meningkatkan kerja sama yang lebih intensif bersama mitra terkait.

**2. Indikator kinerja prosentse Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmed Ned)**

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %	KET
1.	persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmed Ned)	103,40%	19,81%	16,09%	123,12%	
	Capaian rata Rata				123,12%	

Indikator persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmed Ned) tercapai melebihi target, yakni target tahun 2023 sebesar 19,81% sedangkan realisasinya sebesar 16,09%. Namun demikian indikator persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmed Ned) tercapai 100% .

Faktor – faktor yang yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Teknis kerja sama antara Dinas dengan OPD terkait (TNI, TP PKK, IBI serta Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat.
2. Adanya KIE kepada Masyarakat
3. Kualitas Sumber daya Manusia dalam pembinaan dan Penyuluhan Program yang membaik

Permasalahan / Hambatan :

1. Belum Maksimalnya Pemberian Advokasi dan KIE Kepada masyarakat
2. Rendahnya kualitas Sumber daya Manusia dalam pemberian penyuluhan
3. Kurangnya dukunga Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana



Solusi/ Strategis Pemecahan Masalah :

4. Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program Kegiatan
5. Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program melalui kegiatan Persentase kebutuhanber KB yang tidak terpenuhi (Unmed Ned)
6. Perlu peningkatan kesadaran kesertaan ber KB dan PUS melalui pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan KB, serta meningkatkan kerja sama yang lebih intensif bersama mitra terkait

Berikut data realisasi peserta KB Baru tahun 2023 di Kabupaten Bengkalis berdasarkan lokasi Kecamatan.

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
1.	BENGGALIS	532	1991
2.	BANTAN	2243	2966
3.	BUKIT BATU	1172	1353
4.	SIAK KECIL	2045	3189
5.	RUPAT	1711	4065
6.	RUPAT UTARA	1104	2003
7.	MANDAU	3678	1413
8.	PINGGIR	1659	3812
9.	BHATIN SOLAPAN	2470	6229
10.	BANDAR LAKSAMANA	777	2748
11.	TALANG MUANDAU	517	1809
<b>T O T A L</b>		<b>17908</b>	<b>31578</b>

### 3. Indikator kinerja jumlah Kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKA) yang aktif

NO	INDIKATOR KINERJA	Capain 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %	KET
1.	Jumlah kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKA) aktif	82	55	99	180	
	Capaian rata rata				180%	

Indikator Jumlah kelompok BKB,BKR,BKL dan UPPKA dari target tahun 2023 terbentuk 55 Kelompok terealisasi sebanyak 99 kelompok di tahun 2023, (180 %) jumlah persentase kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKA) yang aktif dari target 55 (30 Kelompok dari 55 kelompok) terealisasi 99 (30 kelompok) aktif ditahun 2023 (prosentase capaian 180%)

Faktor – faktor yang yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Teknis kerja sama antara Dinas dengan OPD terkait (TNI, TP PKK, IBI serta Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat.
2. Adanya KIE kepada kelompok Poktan
3. Kualitas Sumber daya Manusia dalam pembinaan dan Penyuluhan Program pada Poktan

Permasalahan / Hambatan :

1. Belum Maksimalnya Pemberian Advokasi dan KIE Kepada masyarakat atau Poktan
2. Rendahnya kualitas Sumber daya Manusia
3. Kurangnya dukunga Masyarakat, Poktan dalam Program Keluarga Berencana

Solusi/ Strategis Pemecahan Masalah :

1. Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program Kegiatan
2. Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program melalui kegiatan Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA
3. Perlu peningkatan kesadaran Masyarakat baik Poktan melalui pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan KB, serta meningkatkan kerja sama yang lebih intensif bersama mitra terkait.



#### 4. Indikator kinerja Persentase Kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKA) yang aktif

NO	INDIKATOR KINERJA	Capain 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %	KET
1.	Persentase kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKA) aktif	91,66%	55%	99%	180%	
	Capaian rata rata				180%	

Indikator Persentase kelompok BKB,BKR,BKL dan UPPKA dari target tahun 2023 55% terealisasi sebanyak 99% kelompok di tahun 2023, (180 %) jumlah persentase kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKA) yang aktif dari target 180% (30 Kelompok dari 55 kelompok) terealisasi 180% (30 kelompok) aktif ditahun 2023 (prosentase capaian 180%)

Faktor – faktor yang yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Teknis kerja sama antara Dinas dengan OPD terkait (TNI, TP PKK, IBI serta Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat.
2. Adanya KIE kepada kelompok Poktan
3. Kualitas Sumber daya Manusia dalam pembinaan dan Penyuluhan Program pada Poktan

Permasalahan / Hambatan :

1. Belum Maksimalnya Pemberian Advokasi dan KIE Kepada masyarakat atau Poktan
2. Rendahnya kualitas Sumber daya Manusia
3. Kurangnya dukunga Masyarakat Poktan dalam Program Keluarga Berencana

Solusi/ Strategis Pemecahan Masalah :

1. Merencanakan, Menganggaran dan melaksanakan Program Kegiatan
2. Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program melalui kegiatan Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA
3. Perlu peningkatan kesadaran Masyarakat baik Poktan melalui pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan KB, serta meningkatkan kerja sama yang lebih intensif bersama mitra terkait.





### SASARAN 3 : MENINGKATNYA KELOMPOK GENERASI BERENCANA

#### 1. Indikator kinerja Jumlah Kelompok PIK- R aktif

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %	KET
1.	Jumlah kelompok PIK-R aktif	114,28%	40	82	205%	
	Capaian rata rata				205%	

Indikator kinerja jumlah kelompok PIK-R yang terbentuk dari target tahun 2023 sebanyak 40 Kelompok terealisasi sebanyak 82 kelompok di tahun 2023 (Capaian (205%), dan jumlah persentase kelompok PIK-R yang aktif dari target 40 (82 Kelompok dari 40 kelompok) terealisasi 205%. Hal ini dapat tercapai berkat kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat serta pihak-pihak terkait

Faktor – faktor yang yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Teknis kerja sama antara Dinas dengan OPD terkait (TNI, TP PKK, IBI serta Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat.
2. Adanya KIE kepada kelompok Pelajar dari tingkat menengah sampai tingkat sekolah tinggi
3. Kualitas Sumber daya Manusia dalam pembinaan dan Penyuluhan Program pada Poktan

Permasalahan / Hambatan :

1. Belum Maksimalnya Pemberian Advokasi dan KIE Kepada masyarakat atau Poktan khusus para generasi muda
2. Rendahnya kualitas Sumber daya Manusia
3. Kurangnya dukunga Masyarakat Poktan dalam Program Keluarga Berencana

Solusi/ Strategis Pemecahan Masalah :

1. Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program Kegiatan
2. Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program melalui kegiatan Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA

3. Perlu peningkatan kesadaran Masyarakat baik Poktan melalui pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan KB, serta meningkatkan kerja sama yang lebih intensif bersama mitra terkait.

2. Indikator kinerja Persentase Kelompok PIK- R aktif

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %	KET
1.	Persentase kelompok PIK-R aktif	88,33%	65%	100%	153,85%	
	Capaian rata rata				153,85%	

Indikator kinerja Persentase kelompok PIK-R yang terbentuk dari target tahun 2023 sebanyak 65% Kelompok terealisasi sebanyak 100% kelompok di tahun 2023 (Capaian 153,85%), dan jumlah persentase kelompok PIK-R yang aktif dari target 65% (82 Kelompok dari 40 kelompok) terealisasi 180%. Hal ini dapat tercapai berkat kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat serta pihak-pihak terkait

Faktor – faktor yang yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Teknis kerja sama antara Dinas dengan OPD terkait (TNI, TP PKK, IBI serta Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat.
2. Adanya KIE kepada kelompok Poktan
3. Kualitas Sumber daya Manusia dalam pembinaan dan Penyuluhan Program pada Poktan


Permasalahan / Hambatan :

1. Belum Maksimalnya Pemberian Advokasi dan KIE Kepada masyarakat atau Poktan
2. Rendahnya kualitas Sumber daya Manusia
3. Kurangnya dukunga Masyarakat Poktan dalam Program Keluarga Berencana

Solusi/ Strategis Pemecahan Masalah :

1. Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program Kegiatan
2. Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program melalui kegiatan Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA



- 
3. Perlu peningkatan kesadaran Masyarakat baik Poktan melalui pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan KB, serta meningkatkan kerja sama yang lebih intensif bersama mitra terkait.

### **C. Realisasi Keuangan**

Di dalam tahun anggaran 2023 ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai anggaran sebesar Rp. 24.365.215.290,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.760.149.330,- atau sekitar 81,10%.

Setiap Anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan memiliki outcomes untuk mencapai target- target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan RENSTRA. Berikut Perbandingan rincian Program- program dan kegiatan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:



**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Per Program/Kegiatan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN ( Rp. )	BOBOT ( % )	REALISASI			
				FISIK	TERTIMBANG	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>17.382.557.988</b>	<b>100,00</b>	<b>97,94</b>	<b>100,00</b>	<b>76,10</b>	<b>13.228.575.923,-</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.104.055.258</b>		100		<b>73.49</b>	<b>8.160.383.683</b>
1.	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.696.259.088</b>	100	100	100	70.65	<b>5.437.687.339</b>
1.	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah /2.14.01.2.01.01	46.500.000,00		100		100	46.500.000
2.	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan / 2.14.01.2.02.01	7.649.759.088,00		100		70.46	5.391.187.339
<b>2.</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>672.000.000</b>	100	100	100	72.38	<b>486.400.000</b>
3.	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD / 2.14.01.2.03.02	672.000.000,00		100		72.38	486.400.000
<b>3.</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>77.160.000</b>	100	100	100	91.52	<b>70.620.000</b>
4.	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan / 2.14.01.2.05.11	77.160.000,00		100		91.52	70.620.000
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>971.666.800</b>	100	100	100	76.06	<b>729.501.157</b>
5.	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor / 2.14.01.2.06.01	59.835.000,00		100		49.92	29.867.000



6.	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor / 2.14.01.2.06.02	112.717.300,00		100		69.46	78.286.900
7.	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor / 2.14.01.2.06.04	68.925.000,00		100		99.06	68.900.000
8.	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan / 2.14.01.2.06.05	71.485.500,00		100		83.69	59.828.600
9.	Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan-peraturan Perundangan-Undangan / 2.14.01.2.06.08	30.000.000,00		100		92.17	27.650.000
10.	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD / 2.14.01.2.06.09	394.754.000,000		100		60.54	238.968.657
11.	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD / 2.14.01.2.06.11	233.950.000,000		100		96.60	226.000.000
<b>5.</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>101.275.000</b>	100	100	100	99.73	<b>101.002.000</b>
12.	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya / 2.14.01.2.07.10	101.275.000,00		100		99.73	101.002.000
<b>6.</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>648.024.370</b>	100	100	100	64.71	<b>419.341.457</b>
13.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat / 2.14.01.2.08.01	173.400.000,00		100		93.77	162.600.000
14.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik / 2.14.01.2.08.02	378.624.370,00		100		42.46	160.741.457
15.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor / 2.14.01.2.08.04	96.000.000,00		100		100	96.000.000
<b>7.</b>	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>937.670.000</b>	100	100	100	97.67	<b>915.831.730</b>





	Sub 100Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya /2.14.01.2.09.0267.55	102.740.000,00		100		79.31	81.481.730
17.	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya /2.14.01.2.09.09	230.400.000,00		100		100	230.400.000
18.	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung dan Kantor atau Bangunan lainnya /2.14.01.09.10	604.530.000,00		100		99.60	603.950.000
<b>II</b>	<b>PRPGRAM : PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>59.535.200</b>		100		67.55	<b>40.215.200</b>
<b>8</b>	<b>Kegiatan : Pemataan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>59.535.200</b>	100	100	100	87.56	<b>40.215.200</b>
19	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB / 2.14.02.2.02.13	59.535.200		100		67.55	40.215.200
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>5.028.640.230.000</b>		100		87.66	<b>4.408.218.104,00</b>
<b>9</b>	<b>Kegiatan : Pelaksanaan Adfokasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Keafrifan Budaya Lokal</b>	<b>674.966.000</b>	100	100	100	85.99	<b>580.374.923</b>
20	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK/ 2.14.03.2.01.03	167.438.000.00		100		76.04	127.315.123
21	Sub Kegiatan : Pengelolaan Oprasional dan Sarana Di Balai Penyuluhan KKBPK / 2.14.03.2.01.07	507.528.000.00		100		89.27	453.059.800





10	<b>Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB 90.12(PKB/PLKB)</b>	<b>1.443.880.300</b>	100	97.50	100	99.73	<b>1.439.954.500</b>
22	Sub 100Kegiatan: Penyediaan Sarana Pendukung Oprasional PKB/PLKB/2.14.03.2.02.02	39.736.300		100		90.12	35.810.500
23	Sub Kegiatan: Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)/2.14.03.2.02.03	660.144.000.00		100		100	660.144.000
24	Sub Kegiatan: Penggerakan Kader Institusi Pergerakan Masyarakat Perdesaan/ 2.14.03.2.02.04	744.000.000.00		100		100	744.000.000
11	<b>Kegiatan: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.246.554.630</b>	100	100	100	88.35	<b>1.939.925.717</b>
25	Sub Kegiatan: Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Kefasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringan mya / 2.14.03.2.03.01	106.829.000.00		100		69.14	73.863.675
26	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP)/ 2.14.03.2.03.03	900.674.000.00		100		74.10	667.385.516
27	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Peunjang Pelayanan KB/2.14.03.2.03.06	1.137.561.830.00		100		98.39	1.119.207.026

28	Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaring nya/ 2.14.03.2.03.08	40.184.800		100		90.73	36.462.800
29	Sub Kegiatan : Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan/ 2.14.03.2.03.09	61.302.000.00		100		<b>70.16</b>	43.006.700
<b>12</b>	<b>Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>663.239.300</b>	100	90.00	100	67.54	<b>447.963.000</b>
30	Sub Kegiatan: Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung Kb / 2.14.03.2.04.03	548.240.000.00		80.00		65.32	358.100.000
31	Sub Kegiatan: Pembinaan Terpadu Kampung KB / 2.14.03.2.04.04	114.999.300		100		78.14	89.863.000
<b>IV</b>	<b>PROGRAM : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	<b>1.190.327.300</b>		87.02		52.07	<b>619.758.900</b>
<b>13</b>	<b>Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>1.190.327.300</b>	100	87.02	100	52.07	<b>619.758.900</b>
32	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)/2.14.04.2.01.02	407.000.000.00		100		97.36	396.222.000





33	Sub Kegiatan : Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksanaan/ Kader Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,PPKS,PIK-R DAN Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS/2.14.04.2.01.04	57.875.900		100		76.53	43.715.900
34	Sub Kegiatan : Peyediaan Biaya Oprasional Bagi Keompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,PPKS,PIK-R DAN Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS/2.14.04.2.01.06	599.000.000.00		50.00		13.01	77.900.000
35	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,PPKS,PIK-R DAN Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS/2.14.04.2.01.07	126.451.400		98.06		80.60	101.921.000
<b>TOTAL</b>		24.365.215.290				81,10.	19.760.149.330



#### **D. Prestasi atau Penghargaan**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selain memenuhi target kinerja dapat pula disampaikan prestasi atau penghargaan tambahan atas kerja keras dan koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan dengan unsur masyarakat yang mendukung program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat disampaikan sebagai berikut:

#### **Daftar Prestasi Atau Penghargaan**

<b>No</b>	<b>NAMA KEJUARAAN/ KEGIATAN</b>	<b>TINGKAT</b>	<b>PRESTASI TAHUN 2022-2023</b>	<b>KET</b>
1.	Terbaik II Dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting Sampai dengan 13,5 % di tahun 2022	Provinsi	2022	
2.	Terbaik II Paling Replikatif pada Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tahun 2022	Provinsi	2022	
3.	Harapan I Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) Terbaik tingkat Provinsi Riau dalam Rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 Tahun 2023	Provinsi	2023	
4.	Terbaik II Atas Capaian Pelaksanaan Program bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 Katogori Kabupaten	Provinsi	2023	





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2023. Penulisan LAKIP ini perwujudan dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Secara umum yang termasuk dalam Interpretasi memuaskan Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.365.215.290,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.760.149.330,- secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.




Berdasarkan pagu indikatif jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis adalah 81,10% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan telah optimal, efektif dan efisien dalam target kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang diharapkan menjadi tolak ukur agar dapat lebih meningkatkan prestasi di masa-masa akan datang dan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang telah membantu penyelesaian LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 maka dapat diselesaikan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS



**H. HAMBALI, S.Pd.I**  
Pembina TK.I  
NIP. 19670305 198811 1 001